

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Ringkasan pembahasan pada Bab III mengenai Pengelolaan Anggaran pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi dimasa yang akan datang.

#### 2. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam Penyusunan Anggaran

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
2. Data masa lalu.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing.
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah.
6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

#### 3. Klasifikasi Anggaran

- a. Berdasarkan Objek
- b. Berdasarkan Organisasi
- c. Berdasarkan Fungsi
- d. Berdasarkan sifat atau karakter
- e. Berdasarkan Kehematan

#### 4. Tujuan Anggaran

- a. Sebagai Pedoman Pelaksanaan
- b. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja
- c. Sebagai Alat Pengawasan Kerja

5. Jenis-Jenis Anggaran
  - a. Anggaran Operasional, berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu
  - b. Anggaran Finansial atau *Financial*, adalah anggaran yang berisi tentang posisi keuangan atau keadaan perusahaan pada saat tertentu yang akan datang
  
6. Proses Penyusunan Anggaran
  - a. Penyusunan Rencana Anggaran
    1. Langkah Awal (*preliminary steps*)
    2. Penyusunan rencana anggaran (*preparing the budget*)
  - b. Persetujuan Legislatif
  - c. Pelaksanaan Anggaran
  - d. Pelaporan dan Audit
  
7. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
  
8. Pedoman yang digunakan dalam perencanaan anggaran dalam pengelolaan anggaran yaitu :
  - a. Rencana Strategi (*renstra*)
  - b. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (*Renja K/L*)
  - c. Penyusunan RKAKL
  
9. Proses Pengajuan Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran
  - a. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (*DIPA*)
  - b. Rencana Penarikan Dana (*RPD*)
  - c. Uang Persediaan (*UP*) atau Ganti Uang (*GU*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sabeni dan Imam Ghazali. 1996. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Jogjakarta : BPFE
- Ellen Christina, M Fuad, Sugiyarto, dan Edi Sukarno. 2001. *Anggaran Perusahaan Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Freeman Robert J, dan Shoulders, Craig D. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting-Theory and Practice*, 7<sup>th</sup> Edition. Pearson Education, Inc
- Granof, Micheal H. 2001. *Government and Not-for-Profit Accounting-Concepts and Practices*, 2<sup>nd</sup> Edition. Pearson Education, Inc.
- M. Nafarin, 2000, “*Penganggaran Perusahaan*”, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Marzuki. (2005), *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Edisi Kedua, Ekosiana, Yogyakarta.
- Munandar, M. 2000. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE.
- Shim Jae.K. dan Joel.G.Siegel. 2000. *Budgeting* (diterjemahkan oleh Julius Mulyadi dan Neneng Natalia). Jakarta : Erlangga.
- Martini, dan Nawawi Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Nazir, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Andi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulida Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta:Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015
- Prabowo. 1996. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Andi Ofset Poerwadarminta
- PERMENDAGRI No 13 tahun 2006
- Renstra tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.02/2015

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara